

Daftar Isi

Image and the Veil: A Barthesian Reading of Veiled Muslim Women Diah Ariani Arimbi	189–194
Peran Politik Perempuan dalam Sistem Matrilineal di Minangkabau, Sumatera Barat Nurwani Idris	195–205
Peranan Perempuan dan Pembangunan di Indonesia Benny Ferdy Malonda	206–218
Makna Seksualitas bagi Akseptor Tubektomi Subagyo Adam	219–224
"Mappasikarawa" dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Wajo Paisal.....	225–231
Mencari Partai Politik Ber-Platform Pembangunan Pedesaan Dwiyanto Indiahono	232–235
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut di Lamongan Roestoto Hartojo Putro	236–242
Anteseden Rasa Saling Percaya dan Kerja Sama Cerdas dalam Tataan Budaya Kolektivistik untuk Membangun Modal Sosial dan Modal Intelektual Siti Sulasmi	243–250
Pemasaran pada Pemerintah Lokal Mas Roro Lilik Ekowanti	251–258
Bencana Tsunami dan Stres Pasca-Trauma pada Anak Nurul Hartini	259–264
Perilaku Penemuan Informasi Mahasiswa FISIP dan Fakultas Farmasi Unair dalam Proses Penulisan Skripsi Agus Santoso.....	265–273

Peranan Perempuan dan Pembangunan di Indonesia

Benny Ferdy Malonda¹

Jurusan Antropologi, FISIP, Universitas Sam Ratulangi, Manado

ABSTRACT

The core of this paper is about women's destiny and their condition in actual social role, based on a review from previous study done since 1950s which generally see women in unlucky position (destiny) and unequal to men in social and cultural life. The original research of this article used the social research method anthropologically, content analysis of mass media, field and library research. After exploring (1) the role of women for fighting to their prestige, the equality of right, the violence and trafficking of women, also the bureaucratic and political role, (2) expert views about the concept of gender condition shaped by the social and cultural condition (and biologically), (3) social and cultural data about barrier and stimulant toward the development program of women, this article provides suggestions on the promotion of women in Indonesia based upon their main potency to play role in the household for resulting the human resource ideally.

Key words: *women's struggle, development, women superiority, bureaucratic role, political role*

Kajian perjuangan kaum perempuan dalam berperan secara sosial, dan dalam masalah gender, penting dikemukakan berkaitan dengan adanya berbagai faktor, seperti: perempuan sebagai objek, kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan, kelemahan dan kelebihan, kondisi peran gandanya, pekerjaan, dan sebagainya; diperhadapkan dengan pembangunan nasional, khususnya untuk pemberdayaan perempuan di Indonesia (Malonda, 1993).

Sebetulnya bibit perjuangan perempuan untuk berperan dalam pembangunan telah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, dan sudah diawali oleh ibu Kartini yang memperjuangkan pendidikan untuk perempuan. Dalam konteks peran dan perjuangan perempuan, pada dekade tahun 1950-an PERWARI sudah menentang munculnya organisasi isteri insinyur dan dokter. Sebagai alasan ialah arti organisasi perempuan berbeda dengan arti organisasi isteri, yang dianggap mengaburkan citra perjuangan perempuan dalam meningkatkan martabat perempuan (Kongres Wanita Indonesia 1978; Malonda 1993).

Pada dekade tahun 1970-an masalah gender di Indonesia yang diangkat, berkaitan dengan tingkat pendapatan para perempuan yang berperan sebagai pekerja lebih rendah dibandingkan dengan para pekerja laki-laki. Tetapi kaum perempuan tertentu dengan kekurangan dan kelemahannya seolah-olah

tak mampu merubah nasibnya. Dalam kaitannya Astrid Susanto (1975) menyatakan, bahwa kaum perempuan yang memfokus pada kajian perempuan cenderung menolak adanya asumsi-asumsi mengenai kelemahan-kelemahan perempuan, seperti perempuan sebagai makhluk yang hidup dalam ketergantungan, menjadi beban setelah masa remajanya, dan lain-lain.

Kritikan para ahli mengenai nasib perempuan di Indonesia dalam rangka perjuangan meningkatkan peranannya dalam pembangunan didasarkan pada persoalan, bahwa masih banyak perempuan Indonesia yang merasa bahagia berada dalam posisi berkorban dan memiliki peran ganda tanpa mempersoalkan apakah pengorbanannya itu memperlemah dan memperkuat ketidakadilan. Lewat faktor-faktor sosial-budaya dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik, perempuan Indonesia diatur dengan rumusan-rumusan dan keseragaman, sehingga pandangan *stereotype* terhadap perempuan tetap melekat pada pribadi perempuan Indonesia. Dalam situasi semacam itu jelas perempuan sulit menemukan jati dirinya dan sulit mengembangkan produktivitas pribadinya. Khususnya bagi perempuan yang pandangannya masih terbelenggu oleh struktur-struktur tersebut, mereka tidak berani dan tidak mampu mengembangkan produktivitas dirinya yang mungkin tidak sesuai dengan rekayasa

¹ Korespondensi: B.F. Malonda. Jurusan antropologi, FISIP, Universitas Sam Ratulangi, kampus UNSRAT Bahu Manado 95113. Telp. 0431 842422; 021 7764459. E:mail: beefem_bfm@yahoo.com

pola perempuan hasil dari aturan permainan struktur (Muniarti, 1992; Malonda, 1993).

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah umum paper ini adalah: "bagaimana sebenarnya nasib kaum perempuan dan kondisi peran sosial mereka?" Untuk menjawab pertanyaan menurut masalah umum tersebut akan dideskripsikan faktor-faktor sebagai berikut: (1) kondisi perjuangan dan berperannya perempuan dalam kehidupan sosial-budaya; (2) pandangan-pandangan teoretis para ahli mengenai gender, khususnya digunakan sebagai dasar menginterpretasi kondisi posisi perempuan dalam kenyataan kehidupan sosial; (3) data riset lapangan yang berhubungan dengan latar belakang masalah gender, sebagai pandangan teoretis data lapangan yang dapat menjadi hambatan dan pendorong (*barrier and stimulant*) pembangunan terhadap kaum perempuan; dan (4) pandangan mengenai bagaimana seharusnya memajukan perempuan dalam pembangunan di Indonesia.

Dalam tulisan ini penulis mengikuti pandangan Geertz (dikutip Saifudin 1990), bahwa dalam metode kualitatif, suatu pandangan teoretis berasal/bersumber dari data faktor sosial-budaya pada latar kajian. Dalam tulisan ini data-data yang diperoleh secara kualitatif, termasuk diinterpretasi berdasarkan *content analysis* terhadap media-media massa yang beroperasi di JABODETABEK dan MAMIBI (Manado-Minahasa-Bitung), seperti TV dan surat

kabar. Semua data juga didukung dengan data hasil kajian kepustakaan, dan data riset lapangan di JABODETABEK serta kabupaten Sumedang, provinsi Jawa Barat (Malonda, 2002)². Sampel pada riset lapangan di JABODETABEK berdasarkan kumpulan data longitudinal dalam observasi (biasa) dan observasi partisipasi. Observasi biasa dan observasi partisipasi dilakukan secara terencana dan tak terencana sejak tahun 1997 sampai tahun 2009. Observasi biasa dapat juga disebut pengalaman observasi tak terencana, yang menghasilkan pengetahuan bagi penulis mengenai kondisi budaya masyarakat dalam bepergian menggunakan transportasi umum. Dengan demikian observasi terencana dan tak terencana terhadap masyarakat umum di JABODETABEK telah dilakukan penulis sebanyak minimal 30-an kali. Observasi partisipasi dan wawancara yang terencana dilakukan penulis, saat menjadi sebagai figuran pasif dan figuran dialog pada sekitar 23 judul sinetron saat pengambilan (*shooting*) gambarnya, dan saat riset kesehatan reproduksi Kabupaten Sumedang, provinsi Jawa Barat.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi peranan perempuan di Indonesia menurut hasil kajian ini diuraikan dan dibahas berdasarkan tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1.
Kategori Pembahasan Data dan Kondisi Peranan Perempuan
(*Data's Category of Discussion and the Condition of Women's Role*)

No.	Kategori pembahasan data	Faktor-faktor teoretis dan praktis
1.	Peran perempuan memperjuangkan nasib, dan kondisi kehidupan sosial-budayanya	Kondisi tidak menguntungkan bagi perempuan dalam: kekerasan, perdagangan, dan diskriminasi terhadap perempuan, serta hanya sedikit perempuan yang berperan secara politis dan birokratis; data kondisi keberadaan sosial budaya perempuan
2.	Pandangan-pandangan teoretis para ahli mengenai gender	Kondisi gender: laki-laki mendominasi terhadap perempuan dalam pandangan proses historis, budaya dan secara alamiah
3.	Data riset lapangan	Data sosial-budaya <i>barrier and stimulant</i> terhadap masalah gender, di latar alat transportasi, pembagian pekerjaan, dan perempuan di daerah pedesaan
4.	Peranan perempuan dalam bidang sosial-ekonomi; dan pandangan superioritas dari perempuan	Perempuan lebih memiliki kapabilitas dibandingkan laki-laki; contohnya berperan dalam perdagangan, pertanian; berperan dalam pengambilan keputusan; dan kaum perempuan memiliki superioritas alaminya.

Sumber: Hasil kajian disusun tahun 2009

² Riset lapangan yang dilakukan penulis di Kabupaten Sumedang berjudul: "Faktor-faktor Sosial-Budaya Reproduksi, dan Gangguan Emosi, serta Fisik, BUMILINCALIN (Ibu hamil, bersalin, dan pasca-salin) Pada Masyarakat Kabupaten Sumedang. Hasil riset ini pernah dimuat pada *Jurnal Kedokteran dan Farmasi MEDIKA*, No. 12 Thn XXVIII thn 2002. Sampel terdiri dari sampel umum ibu yang pernah bersalin (yang tidak hamil) dan sampel khusus BUMIL trimester pertama, kedua, dan ketiga, berjumlah 610 orang, diambil dari tiga latar riset yaitu kecamatan-kecamatan Tanjungsari, Situraja, dan Cimalaka.

Perjuangan Nasib dan Kondisi Kehidupan Sosial-budaya Perempuan

Kajian dalam tulisan ini menunjukkan bahwa kondisi peranan perempuan, ditandai dengan keberadaan perempuan, sebagai penulis-penulis di berbagai media massa, pembicara aktif di berbagai seminar ilmiah dan praktis, aktivis dalam berbagai LSM, bahkan ada yang berperan sebagai pemrakarsa dan pengikut suatu unjuk rasa untuk kepentingan nasib perempuan.

Kaum perempuan yang berperan sebagai penulis dan sebagai sarjana, sebagai contoh menyatakan, bahwa banyak hal kerugian yang dialami perempuan Indonesia. Mereka banyak mengangkat masalah diskriminasi yang dialami kaum perempuan, adanya posisi perempuan sebagai subordinasi, bahkan berpersepsi bahwa perempuan berposisi sebagai warga negara kelas dua dibandingkan dengan laki-laki, adanya marginalisasi terhadap perempuan, dan adanya kekerasan dalam rumah tangga (Manumpil, 2007). Berkaitan dengan peringatan "hari perempuan" terdapat kaum perempuan sebagai aktivis yang mengusulkan kepada DPRD Provinsi Sulawesi Utara, agar seharusnya mencegah dan menghentikan adanya eksploitasi terhadap perempuan, melindungi hak perempuan yang berperan sebagai buruh, dan menganjurkan pemerintah lintas terkait melalui DPRD agar menyusun peraturan untuk melindungi hak-hak kaum perempuan (Tribun Sulut, 2007).

Sebelumnya Gobel (2005) mengekspresikan harapan dan keinginan kaum perempuan untuk bisa berperan secara politis dan birokratis. Hal tersebut merefleksikan adanya persepsi kaum perempuan, bahwa dewasa ini kaum laki-laki mendominasi peran secara sosial dibandingkan dengan kaum perempuan. Dalam hal itu perempuan belum memiliki suatu peranan penting dalam pengambilan keputusan secara politis untuk memperbaiki nasib mereka, dan khususnya belum banyak berperan secara politis/birokratis. Menurut Gobel bahwa:

Kaum perempuan hanya berjumlah di bawah 10% berperan dalam sektor manajemen pemerintahan secara nasional. Kendati dalam UUD 1945 bab X pasal 27 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap warga negara berkedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.... Dalam Undang-undang RI no. 43 tahun 1999 dinyatakan mengenai pokok-pokok kepegawaian,

mengenai jabatan fungsional dan struktural serta berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000, tidak menyebutkan perbedaan jenis kelamin bahkan untuk persyaratan dan kriteria dalam pemberian jabatan bagi seorang PNS.... Dari data riset Januari–April tahun 2005 pada instansi pemerintah provinsi Sulut, secara umum dapat diketahui tugas-tugas penting, peran yang menonjol dan jenis jabatan yang strategis lebih didominasi oleh kaum laki-laki.

Terdapat perempuan yang berperan sebagai penulis yaitu Juni Thamrin (2005) yang aktif di seminar di JABODETABEK serta dapat mengimbangi pandangan di atas. Walaupun latar kajiannya kecil di Indramayu, namun pandangan yang dinyatakan penulis tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa perempuan sesungguhnya telah aktif berpolitik melalui caranya sendiri, yaitu melalui politik yang tidak terinstitusi. Persoalannya adalah bagaimana agar keterlibatan aktif perempuan dalam politik informal selama ini bisa secara efektif memengaruhi keputusan publik. Oleh sebab itu barangkali langkah yang justru lebih penting saat ini bagi bangsa Indonesia adalah bagaimana mentransformasikan struktur pengambilan keputusan publik yang ada agar keputusan dibuat dengan cara kolaboratif di mana aspirasi komunitas perempuan melalui politik informal akan lebih mendapatkan tempat, yang kemudian secara keseluruhan dapat membangun relasi gender yang lebih sehat dan setara.

Isi (*content*) dalam suatu tayangan berita TV (TVRI 26 Nopember 2005) mengemukakan menteri negara pemberdayaan perempuan (sebagai impresi memperjuangkan peranan perempuan) dalam topik meningkatkan kesetaraan perempuan dengan lelaki. Menteri memberikan contoh untuk meningkatkan peranan perempuan dimulai dari rumah tangga. Tetapi sama dengan beberapa deskripsi di atas tayangan ini mengemukakan komentar narator yang berimpresi adanya ketertinggalan perempuan dibandingkan dengan laki-laki, dalam peranan segi kepegawaian. Menurut narator dari 3,5 juta pegawai negeri di Indonesia hanya 40% saja PNS perempuan. Dari seluruh PNS eselon II, perempuan hanya berjumlah 8% dibandingkan dengan laki-laki. Dalam hal itu beritanya memberi impresi perempuan harus menduduki posisi politis-birokratis setara dengan laki-laki. Menteri negara pemberdayaan

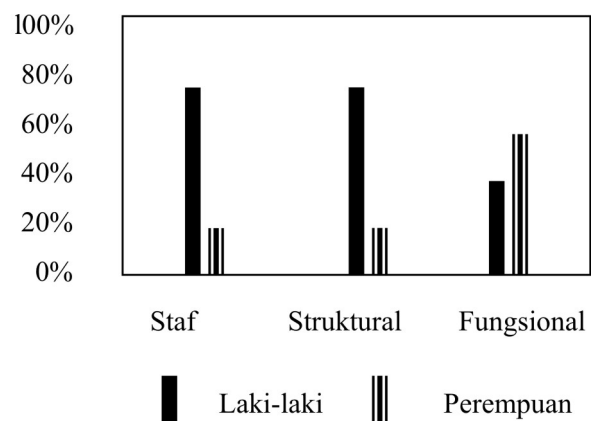
perempuan juga mengemukakan kepentingan tersebut dalam acara wawancara di TV (Metro TV 16 Desember 2005). Isi topik wawancara mengenai konsep kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki, baik di rumah tangga dan dalam peran-peran di sektor-sektor kehidupan ekonomi, kesehatan, pemerintahan, dan lain-lain. Memang topik tersebut sedikit menyinggung peran perempuan untuk tumbuh kembang anak dalam rumah tangga/keluarga, tetapi substansinya belum memberi penekanan fokus topik isi berita yang terpenting.

Berkaitan dengan hal-hal di atas menteri negara pemberdayaan perempuan RI tersebut juga mengimpresikan sikap tegasnya memperjuangkan perempuan dalam situasi lain, ketika menteri berkunjung ke Manado pada 18 April 2006 untuk menghadiri *International Asian Mission Women Conference*. Saat itu menteri menyinggung bahwa pemerintah dan kaum perempuan harus mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang dewasa ini sering terjadi. Juga dalam konteks emansipasi, menurut menteri, perempuan harus memberdayakan dirinya, serta harus memfilterisasi terhadap budaya yang bertolak belakang dengan budaya Indonesia. Ia juga menyampaikan dasar pemikiran pembangunan perempuan, dengan lebih menegaskan akan pentingnya pembangunan perempuan dalam konteks GSI (gerakan sayang ibu) dari kementerian yang dipimpinnya, bahkan menekankan bahwa khususnya kaum perempuan dalam peran berorganisasi secara keagamaan, agar secara rasional dan seimbang mengadopsi isi ayat kitab suci, dengan menyeleksi substansi yang membatasi kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki.³

Terlepas dengan sikap dan kebijakan politik dari partai-partai politik yang memanfaatkan kondisi minat kaum perempuan untuk berperan secara politis dan birokratis, maka sebetulnya perjuangan kaum perempuan telah mendapatkan hasil awalnya, yaitu adanya kebijakan presiden RI pada tahun 2005 bahwa pelaksanaan negara ditetapkan berbasis gender. Hal tersebut terjadi berdasarkan janji presiden pada kampanye pemilihan presiden tahun 2004 untuk mengangkat prestise kaum perempuan, memperbaiki kondisi kesehatan dan pendidikan kaum perempuan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi kaum

perempuan berkarir pada posisi tingkat tinggi di setiap departemen/kementerian. Dalam hal itu posisi eselon I dan II terbuka bagi perempuan dengan cara selektif. Dalam kesempatan lain presiden juga telah mengangkat tiga orang menteri kabinetnya dari kaum perempuan, yang terbukti para menteri dari kaum perempuan tersebut memiliki kapabilitas sama dengan kaum laki-laki. Sikap presiden untuk memajukan perempuan, direfleksikan juga dengan mendukung gagasan setiap partai politik dalam menetapkan quota 30% untuk perempuan berperan di lembaga legislatif. Hal-hal di atas menunjukkan simbol denotatif bahwa pemerintah RI memiliki keinginan agar kaum perempuan dapat berperan dalam kehidupannya secara politis dan birokratis, dalam konteks hakikat karya.

Terlepas dari pandangan-pandangan yang menggambarkan peranan perempuan yang relatif belum positif, terdapat tulisan dari Media Komunikasi berjudul "Ekonomi dari Demokrasi Membiayai Pembangunan Manusia (Indonesia, Laporan Pembangunan Manusia, 2004) yang mengemukakan peran positif perempuan yang baik digunakan sebagai pendorong dan dasar memajukan perempuan dalam pembangunan di Indonesia. Dalam tulisan itu dikemukakan kondisi penampilan kaum perempuan sebagai pegawai pemerintah menurut gambar 1, sebagai berikut:



Gambar 1.
Penampilan Kaum Perempuan sebagai Pegawai Pemerintah
(*Women's Performance as Government Employee*)

Sumber: Statistik Indonesia 2002 Indonesia, dalam *Laporan Pembangunan Manusia (2004) Ekonomi dari Demokrasi Membiayai Pembangunan Manusia Indonesia*

³ Bagian data tersebut merupakan satu-satunya yang diperoleh penulis dengan teknik observasi partisipasi di MAMIBI (Manado-Minahasa. Bitung). Yang artinya penulis juga hadir pada saat pelaksanaan acara tersebut.

Gambar 1 tersebut memang menunjukkan bahwa penampilan laki-laki sebagai pegawai pemerintah mendominasi posisi struktural, yang berjumlah 80% dibanding perempuan kurang dari 20%. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa kaum perempuan yang berjumlah 60% mendominasi posisi fungsional (dan laki-laki hanya 40% dalam posisi itu). Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas kaum perempuan (dalam konteks superioritas perempuan) adalah pada posisi fungsional dan melebihi kemampuan laki-laki.

Dalam mengkaji peranan perempuan, dapat dinyatakan sebetulnya kaum perempuan di Indonesia memiliki potensi positif berperan dalam rumah tangga untuk pengembangan/pendidikan anak (dalam konteks biologis dan kepribadian). Tetapi, pembangunan terhadap perempuan relatif terhambat, karena kondisi Indonesia berpenduduk padat lebih dari 220 juta jiwa, serta dana pembangunan lintas departemen dan kementerian yang relatif belum memadai, berpengaruh pada program menjangkau sasaran pembangunan di daerah-daerah pedalaman. Namun demikian program pembangunan untuk perempuan (seperti dari departemen kesehatan, departemen pendidikan) secara relatif telah cukup berpengaruh terhadap status kesehatan (kecuali kesehatan maternal) dan pendidikan. Walaupun demikian kebudayaan lokal di pedalaman dan bahkan di perkotaan (dengan kondisi kaum perempuan mendominasi ruang domestik) berpengaruh pada kondisi kehidupan sosial, sungguhpun pemerintah nasional (khususnya kementerian pemberdayaan perempuan) memiliki program pemberdayaan kaum perempuan. Tetapi telah terdapat implementasi program tertentu dari pemerintah untuk kepentingan pembangunan perempuan, seperti adanya tindakan hukum dari kepolisian sebagai alat hukum pemerintah, yang telah mulai memberantas perdagangan perempuan dan prostitusi di JABODETABEK dan MAMIBI yang disiarkan media elektronik tahun 2007. Demikian juga terdapat program-program yang ada sebelumnya dari kementerian pemberdayaan perempuan yang telah didukung oleh kebijakan presiden seperti dikemukakan di atas.

Hasil kajian kepustakaan juga menemukan kondisi positif dari hasil pembangunan yang berkaitan dengan perempuan. Dalam laporan pembangunan manusia (2004), dikemukakan hasil positif yang mendukung pembangunan perempuan di Indonesia. Dinyatakan dalam laporan itu pemerintah Indonesia telah meratifikasi terhadap konvensi PBB untuk memberantas kondisi diskriminasi terhadap kaum perempuan. Wanita dilaporkan telah memiliki

kemajuan dalam pembangunan ekonomi. Tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja adalah 37,2% (dibandingkan dengan laki-laki) pada tahun 1999 dan menjadi 37,5% pada tahun 2002. Dalam pembangunan pendidikan, perempuan juga telah memiliki kemajuan. Dalam hal itu jumlah murid perempuan pada sekolah dasar berjumlah sama dengan murid laki-laki. Walaupun murid di sekolah lanjutan atas didominasi murid laki-laki, tetapi murid sekolah lanjutan pertama didominasi oleh murid perempuan. Kecuali, dalam pembangunan kesehatan untuk kaum perempuan (khususnya untuk kesehatan maternal) dinyatakan dalam kondisi memprihatinkan. Dalam hal itu sampai tahun 2000 angka MMR (angka kematian maternal) adalah 307/100.000 (artinya 307 orang perempuan meninggal per 100.000 kelahiran). Tetapi dalam konteks sosial-budaya, maka angka MMR berbeda kejadiannya di Indonesia, seperti MMR di masing-masing provinsi, sebagai berikut: Papua 1.025/100.000, Maluku 796/100.000, dan Jawa Barat adalah 686/100.000.

Mendukung gambaran di atas mengenai kemajuan dari kaum perempuan, pada tabel 2 di bawah ini akan dikemukakan mengenai keadaan perempuan dalam pembangunan manusia di sepuluh kota/kabupaten.

Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa dalam variabel umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Jumlah perempuan yang *melek* huruf tampaknya hampir sama dengan laki-laki. Contoh ukuran perbandingan jumlahnya antara perempuan dengan laki-laki: di Ambon 98,5% dan 99,3%, di Pematang Siantar 98,2% dan 99,3%, di Banda Aceh 98,5% dan 99,4%, di Batam 98,8% dan 99,3%, di Karo 96,0% dan 99,4%. Dalam variabel rata-rata jumlah tahun bersekolah perempuan juga hampir sama dengan laki-laki. Ukuran perbandingan antara perempuan dan laki-laki di Ambon 10,1 dan 10,6, di Pematang Siantar 9,9 dan 10,7, di Denpasar 10,0 dan 11,5, di Banda Aceh 10,9 dan 11,4, di Yogyakarta 10,9 dan 11,5, serta di Batam 10,9 dan 10,9. Dalam variabel kontribusi terhadap pendapatan dalam persentase tampak didominasi oleh laki-laki, tetapi ukuran antara perempuan dengan laki-laki (didominasi perempuan), yaitu di Ambon 50,6% dan 49,4%, dan di Toba Samosir 52,0% dan 48,0%.

Berdasarkan data-data di atas mengenai peran perempuan memperjuangkan nasib, dan kondisi kehidupan sosial-budayanya, dapat dilihat memang terdapat penilaian kalangan perempuan akan kondisi-kondisi merugikan bagi nasib perempuan. Terutama kaum perempuan merasa hanya kurang berperan secara politis/birokratis, tetapi terdapat faktor-faktor yang dapat mendukung pembangunan terhadap

Tabel 2.
Keadaan Wanita dalam Pembangunan Manusia, Sepuluh Kabupaten dan Kota di Indonesia
(*The performance of Women, in Human Development, ten performances of town and regency in Indonesia*)

Kabupaten dan Kota	Harapan Hidup (tahun)		Melek Huruf (%)		Rata-rata Bersekolah (year)		Kontribusi terhadap Pendapatan (%)	
	P	L	P	L	P	L	P	L
1. Kota Salatiga	72,1	68,1	89,2	97,5	8,9	10,2	47,5	52,5
2. Kota Ambon	73,9	68,9	98,5	99,3	10,1	10,6	50,6	49,4
3. Kota Pematang Siantar	72,8	68,9	98,2	99,3	9,9	10,7	36,2	63,8
4. Kota Denpasar	74,2	70,4	92,0	97,4	10,0	11,5	32,7	67,3
5. Kota Banda Aceh	70,5	66,5	98,5	99,4	10,9	11,4	42,0	58,0
6. Kab. Toba Samosir	68,8	64,9	93,2	99,2	8,4	9,9	52,0	48,0
7. Kota Kediri	70,6	66,6	92,9	97,9	8,8	9,9	42,8	57,8
8. Kota Yogyakarta	74,8	70,9	91,7	98,6	10,0	11,5	33,9	66,1
9. Kota Batam	71,6	67,7	98,8	99,3	10,9	10,9	40,1	59,9
10. Kab. Karo	72,9	69,0	96,0	99,4	8,3	9,1	39,9	60,1

Sumber: Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2004

kepentingan perempuan, seperti perempuan telah dominan berperan dalam posisi fungsional sebagai PNS. Juga dalam ukuran program pembangunan manusia, perempuan memiliki potensi positif, seperti umur harapan hidup lebih tinggi dari laki-laki, dan status pendidikan sekolah lanjutan yang hampir sama dengan laki-laki, serta kondisi kontribusi terhadap pendapatan hampir sama dengan laki-laki.

Pandangan-pandangan Teoretis Mengenai Masalah Gender

Kajian peranan perempuan, dan dalam memperjuangkan nasibnya dapat dibahas berdasarkan pandangan-pandangan teoretis para ahli di bawah ini.

Berdasarkan pandangan-pandangan teoretis para ahli mengenai masalah gender, maka sebetulnya dalam konsep ketidaksetaraan dalam gender, dalam hal laki-laki secara relatif mendominasi perempuan seperti dipersepsikan kaum perempuan tertentu (dikaitkan dengan dominasi dalam kehidupan sosial-politik, dan lain-lain), tidak dapat dilihat dalam cara pandang praktis karena kepentingan pragmatis. Kajian teoretis kepustakaan memandang masalah gender sebagai berikut:

Pandangan teoretis gender dalam antropologi banyak dikaitkan oleh para ahli dengan makna-makna perilaku yang ditandai secara budaya, seperti peranan berdasarkan jenis kelamin, yang dicirikan masyarakat manusia sebagai perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Menurut sebagian besar ahli, perilaku gender dibentuk berdasarkan kekuatan-kekuatan historis dan tidak semata-mata berkaitan dengan faktor biologis (Ortner & Whitehead, 1981;

Rosaldo & Lamphere, 1974; Sacks, 1979; & Sanday, 1981a). Terdapat ahli yang memang menekankan penggambaran gender menurut kelemahan-kelemahan perempuan dengan menyatakan, arti kelemahan-kelemahan perempuan dalam konteks gender sebagai pemahaman secara budaya yang mendasari perbedaan status antara perempuan dengan laki-laki, dan sering menyepelekan peranan perempuan. Dalam konsep gender dikemukakan arti perbedaan-perbedaan sikap dan perilaku menurut status dan peranan antara perempuan dengan laki-laki dalam masyarakat. Perbedaan-perbedaan ini seolah-olah ada secara alami dan wajar sebagai budaya masyarakat. Konsep gender secara sosial-budaya digambarkan sebagai peranan-peranan yang secara sosial terkonstruksi diperoleh kaum perempuan dan laki-laki. Tetapi arti perbedaan antara perempuan dengan laki-laki dalam konsep gender bukan merupakan bawaan secara lahir. Ini merupakan suatu batasan yang diperoleh perempuan dan laki-laki secara prosedural dalam lingkungan sosial-budaya mereka sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang dianut suatu masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat pendahulu (W. Rosemary & Gilbert, 1962).

Kondisi sosial-budaya dan historis yang berpengaruh terhadap masalah gender dapat dikemukakan berkaitan juga dengan kajian yang memfokus pada eksplorasi mengenai asal perkembangan stratifikasi berdasarkan jenis kelamin dan ketidaksetaraan gender, tertuju pada tingkatan berciri publik yang bertentangan dengan kedudukan privat yang berkaitan dengan konteks kekuasaan. Dalam hal itu Melvin Ember dan Carol Ember (1971) dalam Don Brown (1991) menyatakan

bahwa secara universal, dalam setiap masyarakat, laki-laki mendominasi terhadap arena politik. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu: (1) dalam berperang di mana-mana hampir menjadi aktivitas dari laki-laki; (2) para laki-laki banyak terlibat dalam berbagai aktivitas, seperti dalam perdagangan jarak jauh, berburu, terlibat dalam konflik fisik, yang menjadikan mereka lebih banyak memiliki pengetahuan akan dunia luar; dan (3) para perempuan lebih giat terlibat dalam memelihara anak, dan sering membatasi kesempatan mereka mengembangkan ikatan-ikatan sosial serta persekutuan-persekutuan di luar keluarga yang perlu untuk membangun dan memelihara kepemimpinan politis.

Namun, korelasi antara faktor memelihara anak (secara domestik) dengan faktor kepemimpinan politik, telah banyak diperdebatkan. Lewellen (1992) menyatakan, bahwa kapanpun hal kesuburan (dalam melahirkan anak) dianggap tidak bernilai tinggi, perempuan sering lebih terbebas dari kekangan karena memelihara anak, dan mengakibatkan perempuan lebih siap terlibat untuk pengambilan keputusan secara luas dalam komunitas. Akan tetapi, kesempatan baru yang diperoleh tersebut oleh kaum perempuan, bagaimanapun juga tidak tanpa kerugiannya. Karena, menurut Schlegel (1972) bahwa: "harapan-harapan keberhasilan dan kepuasan perorangan (yang diyakini perempuan) pada suatu arena, mengancam dan merongrong terhadap faktor arena lain mereka". Hal tersebut mengarahkan pada suatu perdebatan, bahwa fakta yang paling penting dalam menetapkan status perempuan bukan suatu sistem budaya yang diwariskan tetapi lebih pada (tergantung dan berhubungan dengan) kondisi faktor organisasi kelompok domestik (rumah tangga).

Dalam pandangan teoretis lain, menurut para ahli, bahwa asal dan perkembangan ketidaksetaraan dalam pandangan gender maupun dalam kenyataan-kenyataan kehidupan lainnya, bisa tidak pernah akan berakhir untuk ditentukan. Bahkan jika hal tersebut ada, hanyalah sedikit bermakna secara praktis untuk memahami peranan gender kontemporer secara lintas-budaya. Kajian mengenai stratifikasi berdasarkan jenis kelamin oleh karenanya telah dialihkan dari asal dan perkembangannya memfokus pada pencarian pemahaman kekayaan kompleksitas organisasi keluarga dan pengambilan keputusan (Sanday & Goodenough, 1990). Kajian-kajian terhadap perspektif tersebut baik dalam suasana kehidupan setiap hari secara formal dan informal, menemukan bahwa perempuan memiliki keseimbangan, kendati sumber-sumber kekuasaannya sering berbeda dalam kaitan berhadapan dengan

harapan-harapan dan kebutuhan-kebutuhan kaum laki-laki (Lepowsky, 1993). Selanjutnya minat yang diperbaharui mengenai proses-proses mikropolitik, sesuai dan mengikuti anjuran Jane Collier dan Sylvia Yanagisako (1987), yang menyatakan bahwa gender dan kekerabatan merupakan domain-domain yang satu sama lainnya saling terkonstruksi serta perlu dijadikan satu bidang analisis.

Berdasarkan persepsi kaum perempuan terkait dengan masalah gender yang merugikan kaum perempuan, maka pandangan teoretis di bawah ini mengenai bio-psikologi dan sosio-biologi secara antropologis dapat juga dijadikan bahan pertimbangan dalam sepak terjang memperjuangkan masalah gender. Kajian ini sedikit berbeda fokus dengan pandangan-pandangan teoretis sebelumnya di muka yang menyebutkan kondisi gender terproses secara historis dan sosial-budaya saja yang bukan semata-mata secara biologis. Justru bukti data bio-psikologi digali dari empat sumber kajian, yaitu uniformitas lintas-budaya (satu kajian tak terlepas dengan pandangan-pandangan teoretis di muka), observasi perilaku bayi, perbandingan primat yang tinggi/besar, dan deskripsi karakteristik-karakteristik secara fisiologis. Oleh karena itu kajian tersebut cenderung dikatakan terfokus dalam paduan secara biologis dan psikologis. Demikian dalam kajian (Lewellen, 1992) ditemukan bahwa anak-anak lelaki secara konsisten lebih agresif dan kompetitif, sedangkan anak-anak perempuan lebih integratif [penuh kasih sayang dan mudah terharu, sudi berbagi (hati), dan kooperatif]. Kajian terhadap perilaku bayi menunjukkan suatu pola yang sama. Korelasi antara faktor hormon *testosterone* laki-laki dengan keagresifan diketahui dengan baik (Maccoby & Jacklyn, 1974), tetapi dinyatakan bahwa tidak benar lelaki selalu sebagai agresor dan perempuan selalu sebagai korbannya. Sebagai contoh, Burbank (1994) menyatakan bahwa perempuan sering menggunakan agresi dan marah untuk melakukan perlindungan kepentingan diri, digali dari data kajian tahun 1975 terhadap 2.143 keluarga orang Amerika. Ia menyatakan perempuan menjadi sasaran korban sebanyak laki-laki, sebagaimana laki-laki menjadi sasaran korban dari perempuan.

Kajian tersebut juga menyatakan adanya bias gender, mengenai agresi kaum laki-laki terhadap perempuan karena kekhawatiran akan penghianatan dari perempuan, sedangkan agresi kaum perempuan terhadap laki-laki karena termotivasi mendapatkan dukungan materi bagi mereka dan anak-anak. Namun setidaknya, hasil kajian di atas bisa saja dipakai sebagai pegangan relatif, bahwa kecenderungan

keagresifan dan kompetitif dari laki-laki bisa berpengaruh terhadap kondisi posisi-posisi politis dan lain-lainnya dipegang kaum laki-laki, dan yang telah terkonstruksi secara historis dan sosial-budaya. Namun menurut penulis, boleh diasumsikan terbalik yaitu faktor (variabel) independen "secara historis serta sosial-budaya" dan faktor *intervenning* "kondisi biologis dari keagresifan/kompetitif laki-laki", berpengaruh terhadap faktor "posisi politis/birokratis di masyarakat tertentu dipegang mayoritas laki-laki". Dengan demikian persepsi kaum perempuan mengenai dominasi laki-laki terhadap posisi politis/birokratis bukan karena alasan ketidakadilan (dan adanya pandangan warga kelas satu dan dua) tetapi disebabkan karena proses secara historis serta sosial-budaya, dan karena proses alami. Tetapi berpengaruhnya faktor biologis dan keagresifan terhadap kondisi dominasi laki-laki terhadap perempuan hanya simpulan sebagian kecil ahli saja.

Secara positif keseluruhan pandangan teoretis di atas dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam mendiskusikan cara menghilangkan kerugian-kerugian kaum perempuan dalam kehidupan sosial-budayanya (dengan menghilangkan cara pandangan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki), dikaitkan dengan usaha pembangunan pemerintah, melalui pembangunan lintas departemen/kementerian (pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, hukum dan HAM, dan lain-lain) untuk memajukan kaum perempuan.

Data Riset Lapangan: Tantangan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan

Data hasil observasi di JABODETABEK menemukan anak-anak laki-laki remaja, bahkan anak-anak berumur rata-rata 10 tahun saja telah bersikap sopan dengan mementingkan budaya menghargai perempuan baik yang sebaya dengan mereka dan yang lebih tua sekalipun. Sebagai contoh dalam suatu percakapan di bis kota kelas ekonomi, seorang anak laki-laki mengatakan kepada teman laki-lakinya agar berdiri untuk memberikan tempat duduk kepada anak-anak perempuan yang berdiri dekat mereka. Dalam situasi yang lain di bis kota dan kereta listrik kelas ekonomi JABODETABEK

juga beberapa orang dewasa bersikap dalam budaya santun menghargai perempuan untuk dipersilahkan duduk pada tempat yang sudah mereka gunakan, apalagi bagi perempuan berumur tua. Hal-hal tersebut menunjukkan adanya pandangan budaya kelebihan kekuatan fisik dari laki-laki terhadap perempuan, yang sebetulnya merupakan dasar adanya perbedaan dalam konteks gender.

Dapat ditemui bahkan sampai tahun 2009 di alat transportasi kereta api listrik JABODETABEK, dalam kondisi padat penumpang, para lelaki dewasa tertentu akan mempersilahkan perempuan untuk duduk pada tempat yang mereka telah gunakan. Konteks komunikasi budaya dalam berbicara yang muncul dalam alat-alat transportasi, dalam observasi sebelum tahun 2009, seperti: "kasih tempat duduk dong buat perempuan"; "Polan kamu berdiri! "Dia kan perempuan!" "Silahkan duduk bu/mbak! (sambil berdiri seorang laki-laki mempersilahkan seorang perempuan untuk duduk, dan dengan sambil senyum dan mengucapkan terima kasih si perempuan langsung menempati tempat duduk yang bersangkutan). Dengan demikian alasan perbedaan fisik/biologis antara perempuan dengan laki-laki tersimbol secara budaya, dalam makna denotatif lelaki pantas berdiri dan perempuan pantas duduk pada alat transportasi yang padat penumpang. Adapun makna konotatifnya (secara simbolik) bahwa kondisi tersebut merupakan bibit terkonstruksinya secara budaya superioritas laki-laki, dalam bentuk *self regulation* (wujud dari mekanisme adanya aturan tak tertulis dari masyarakat dalam berinteraksi untuk memelihara/mengatur keseimbangan sosial, sebagai satu aspek dari *legal pluralism*).⁴

Dalam tulisan ini terdapat data elemental teoretis, hasil observasi di kereta listrik JABODETABEK tahun 2005, bisa juga menjadi dasar pengetahuan untuk arah pembangunan perempuan berperan secara sosial-budaya. Observasi tersebut menunjukkan ketika dalam kondisi saat mana terdapat penumpang (yang duduk di samping para perempuan) turun di stasiun tertentu, maka secara spontan para perempuan yang masih duduk, bersikap sebagai penentu siapa calon penumpang yang berdiri di depan mereka untuk menempati tempat duduk yang ditinggalkan kosong. Dalam konteks gender para wanita yang masih duduk tersebut akan secara spontan menunjuk dan memanggil (dengan cara menyentuh) perempuan

⁴ Pandangan teoretis *legal pluralism* seperti dikutip dan dikemukakan oleh I. Nyoman Nurjaya (2001), terdiri dari empat aspek yaitu: (1) bentuk legislasi dari suatu pemerintahan sebagai *state law* (hukum negara), (2) aturan-aturan lokal berdasarkan kebiasaan suatu masyarakat, sebagai *customary law* (hukum adat), (3) peraturan-peraturan berdasarkan agama, sebagai *religious law* (hukum agama), dan (4) mekanisme dari adanya koordinasi dan pengaturan-pengaturan, sebagai *self regulation* (pengaturan diri dalam kesepakatan nonformal)

di dekat mereka yang dipilih untuk duduk. Data ini menunjukkan secara budaya para perempuan lebih memilih perempuan yang berdiri di dekat mereka, diberi kenyamanan untuk duduk, walaupun ada orang sebagai laki-laki setua apapun penampilannya berada dekat tempat duduk kosong yang ditinggalkan penumpang. Dalam situasi itu kaum perempuan lebih membela kaumnya, yang dalam pandangan konstruksi budaya, perempuan harus diperlakukan secara khusus, dan secara bio-psiko-sosio-budaya, tersimbol perempuan tidak berkemampuan sama dibandingkan dengan laki-laki.

Hasil observasi tahun 2005 juga, masih dapat ditemukan seorang perempuan sebagai mahasiswa, ketika di kereta listrik kebetulan berdiri (tidak mendapat tempat duduk, dan naik dari stasiun UI) di dekat seorang laki-laki lansia, spontan menyilahkan si laki-laki tersebut menempati tempat duduk yang ditinggalkan penumpang yang turun di stasiun Tebet. Tetapi spontan pula laki-laki lansia tersebut yang berpenampilan agamis, menyentuh bahu si perempuan dan menyilahkan untuk duduk. Akhirnya si perempuan menempati tempat duduk yang ditinggalkan penumpang yang turun. Hal tersebut menunjukkan laki-laki lansia tersebut memiliki budaya mengutamakan perempuan untuk diberi kenyamanan (termasuk bersimbolkan laki-laki secara fisik lebih kuat dari perempuan), dan sikap si perempuan sebagai mahasiswa menyimbolkan pengakuan budaya bahwa perempuan secara fisik lebih lemah dibandingkan laki-laki.

Penulis memiliki data hasil observasi partisipasi terhadap produksi sinetron di JABODETABEK dengan 23 kali menjadi figuran tanpa dialog dan berperan berdialog. Pada mulanya ini menjadi sasaran memperoleh pekerjaan dalam seni peran. Ide menjadikan proses produksi sebagai objek kajian timbul ketika mengamati terdapat pemeran/artis tertentu tidak disiplin mengatur waktu, di samping mengetahui artis tertentu ada yang melakoni pekerjaannya dalam sehari pada dua perusahaan produksi sinetron. Hal tersebut memang bukan menjadi pokok kajian, tetapi sesuai dengan tema paper ini dapat dilihat data hasil kajiannya berikut ini. Dalam produksi sinetron menunjukkan hampir semua lini sistem produksi dari perusahaannya dikuasai kaum laki-laki. Dari tiga perusahaan produksi sinetron yang dikaji, memang ditemukan seorang perempuan sebagai ASTRADA (asisten sutradara), tetapi selebihnya dari rata-rata 25 orang pekerja dalam ukuran satu perusahaan (bagian *lighting*, *cameramen*, dan lain-lain) umumnya diperankan laki-laki. Kecuali pekerjaan bagian

perias artis, umumnya diperankan perempuan, dan khususnya kaum waria yang konteks gendernya tidak dikaji dalam tulisan ini.

Memang pekerjaan seni memproduksi sinetron memerlukan kemampuan menurut bakat seni, memerlukan pendidikan dan pembelajaran khusus secara formal, serta kemampuan fisik (karena pekerjaan syuting bisa saja terjadi dari jam sepuluh pagi sampai dini hari), dan adanya seleksi alami. Tetapi kurangnya perempuan berperan dalam pekerjaan seni produksi sinetron, cenderung karena secara sosial-budaya banyak perempuan lebih menilai tinggi pekerjaan kepegawaian negeri dan swasta (juga dalam penekanan pekerjaan politis/birokratis), dan masyarakat umum belum mengenal dan mengapresiasi pekerjaan seni tersebut.

Data hasil kajian dalam judul Faktor-faktor Sosial-Budaya Reproduksi, Gangguan emosi dan Fisik Ibu Hamil Bersalin Pascasalin di Masyarakat Pedesaan Kabupaten Sumedang (Malonda, 2002), dapat juga digunakan sebagai dasar pembahasan peranan perempuan dalam kehidupan sosial-budayanya. Sasaran kajian ini adalah 110 orang informan umum/tokoh masyarakat, 35 orang informan *bumilincalin* (ibu hamil-bersalin-pasca-salin) untuk studi kasus, dan 465 orang informan khusus untuk kuantifikasi (hanya 427 informan yang dipakai untuk uji analisis diskriminan). Memang sampel/informan yang ditetapkan secara khusus hanya secara tertuju untuk kajian kuantitatifnya, sehingga persebaran kondisi pendidikan sampel secara statistik tidak normal, yaitu 61,12% berpendidikan rendah (261 orang dari 427 orang pernah dan lulus SD). Sisanya, 150 orang pernah SLTP/SLTA dan lulus, dan hanya 16 orang lulusan D1 sampai S1.

Tetapi data elemental yang diperoleh dari kajian tersebut, adalah umumnya informan khususnya perempuan tidak mempersoalkan status domestiknya, dengan menjalankan kehidupan apa adanya. Tidak terdapat tanda-tanda perempuan di lokasi kajian kabupaten Sumedang, mempersoalkan ketidaksamaan status dalam masalah gender. Bahkan dalam masyarakat setempat terdapat premis budaya yaitu perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena akhirnya akan ke dapur juga.

Berdasarkan data-data di atas mengenai peran perempuan memperjuangkan nasib, dan kondisi kehidupan sosial-budayanya, dapat dilihat memang terdapat penilaian kalangan perempuan akan kondisi-kondisi merugikan bagi nasib perempuan. Terutama kaum perempuan merasa hanya kurang berperan secara politis/birokratis, tetapi terdapat faktor-faktor yang dapat mendukung pembangunan terhadap

kepentingan perempuan, seperti perempuan telah dominan berperan dalam posisi fungsional sebagai PNS. Juga dalam ukuran program pembangunan manusia, perempuan memiliki potensi positif, seperti umur harapan hidup lebih tinggi dari laki-laki, dan status pendidikan sekolah lanjutan yang hampir sama dengan laki-laki, serta kondisi kontribusi terhadap pendapatan hampir sama dengan laki-laki.

Demikian data-data elemental di atas mengenai observasi sosial-budaya di alat transportasi, observasi partisipasi dalam produksi sinetron, dan kajian sosial-budaya di Kabupaten Sumedang, dapat menjadi dasar pandangan kelompok perempuan dan pemerintah yang ingin mengedepankan peranan perempuan secara politis birokratis.

Peranan Perempuan dalam Bidang Sosial dan Ekonomi

Sebelum tahun 1992 terdapat tulisan yang mengemukakan peran perempuan yang menonjol dalam bidang sosial dan ekonomi. Peran perempuan di bidang sosial ekonomi misalnya dikemukakan dalam tulisan berjudul "Keluarga Jawa" oleh Hildred Geertz (1983). Ia menyatakan bahwa, perempuan berperan dalam bidang ekonomi secara umum, seperti sebagai pemilik sawah yang terlibat dalam siklus penanaman, pengangkutan, dan sampai distribusi. Menurutnya pasar dikuasai perempuan, bahkan pedagang besar beras dikuasai kaum perempuan. Pudjiwati (1985) dalam tulisan berjudul "Peranan Perempuan dalam Perkembangan Masyarakat Desa" menyatakan, terdapat perempuan yang berperan sebagai pedagang, usaha kerajinan tangan, industri kecil, dan bidang jasa, yang pelakunya berasal dari keluarga mampu dan tidak mampu. Dalam bidang sosial non ekonomi Ann Stoler (1975) dalam tulisannya berjudul "Struktur kelas dan Otonomi Wanita Pedesaan di Jawa, mengemukakan terdapat peran perempuan di pedesaan Jawa dalam bidang politik praktis. Ia memberi contoh secara kasusistik terdapat dua orang perempuan berkemampuan ekonomi kuat yang masing-masingnya dapat menjadikan secara politis suami dan anak sebagai lurah. Dengan demikian dalam kenyataan sosial ekonomi tersebut menunjukkan terdapat peran perempuan di dalamnya yang menunjukkan kapabilitas dalam konteks berperan ganda.

Kondisi Superioritas dari Perempuan

Terdapat ahli yang membantah akan pandangan perempuan berposisi inferior dibandingkan dengan laki-laki, dengan mengemukakan konsep superioritas dari perempuan. Contohnya Ashley Montagu (1953) mengemukakan banyak perempuan yang berperan sebagai ilmuwan, pelukis, dan musisi, yang sejajar dengan laki-laki. Menurutnya peran perempuan yang tidak sebanyak laki-laki, karena kondisi motivasi dan aspirasi perempuan terhadap peran-peran itu. Ashley Montagu juga menyatakan Menjelang PD II pecah, tidak ada lagi keraguan bagi tiap orang terhadap perempuan berperan dalam pelayanan sipil seperti laki-laki, dan dalam kasus lain menurut pekerjaan yang menggunakan tenaga fisik. Perempuan juga dikatakan tidak semata-mata berperan dalam sektor bidang organisasi/pemerintahan, tetapi juga berperan dalam bidang perkantoran dan perbankan, berperan sebagai dewan direktur pada banyak perusahaan besar seperti di Amerika Serikat, dan lain-lain. Di banyak bagian dunia, perempuan dalam jumlah besar juga telah berperan sama seperti di Amerika Serikat, dan dalam banyak jenis peranan.

Sebelumnya memang menurut Ashley Montagu, para perempuan secara budaya telah dikondisikan inferior dibandingkan dengan laki-laki, dalam arti laki-laki menduduki posisi-posisi superior hampir di setiap masyarakat. Tetapi, simpulan-simpulan teoretis sains modern telah melemahkan dan membantah terhadap keyakinan lama mengenai posisi inferior perempuan dari laki-laki. Malahan menurut Ashley Montagu perempuan lebih berbakat dibandingkan dengan laki-laki, dan perempuan secara keseluruhan memiliki sejumlah keuntungan biologis dibandingkan dengan laki-laki. Bukti perempuan tidak inferior dari lelaki secara kualitatif dicontohkan oleh Ashley Montagu dengan adanya beberapa petinggi negara sebagai perempuan seperti Ratu Juliana (kerajaan Belanda), Ratu Elizabeth I dan seterusnya (kerajaan Inggris), dan lain-lain (Montagu, 1953).

Kesimpulan

Terdapat kelompok perempuan yang menyadari potensi positif, dan faktor-faktor merugikan bagi mereka dalam masalah gender. Faktor-faktor merugikan tersebut, seperti adanya perdagangan

perempuan, prostitusi, pandangan marginalisasi terhadap perempuan, merasa berposisi sebagai warga negara kelas dua dibandingkan dengan laki-laki, serta pandangan mengenai perempuan kurang berperan secara politis/birokratis, dan lain-lain. Oleh karenanya kaum perempuan telah berperan memperjuangkan nasib untuk membangun kaumnya. Terkait dengan hal-hal di atas, pemerintah memang telah merespon masalah tersebut, melalui kementerian pemberdayaan perempuan, adanya tindakan nyata alat hukum yang khususnya membasmi perdagangan perempuan dan prostitusi, di samping adanya kebijakan pemerintah untuk memposisikan kaum perempuan sejajar dengan laki-laki dalam kedudukan politis/birokratis, serta posisi legislatif.

Menurut pandangan teoretis umumnya para ahli, kenyataan sosial mengenai kondisi yang merugikan perempuan dalam masalah gender, merupakan akibat dari proses panjang secara historis dan sosial-budaya. Sedangkan menurut pandangan sebagian kecil ahli, bahwa kondisi merugikan tersebut bisa dipengaruhi oleh sifat bawaan laki-laki yang lebih agresif daripada perempuan. Sifat bawaan laki-laki merupakan warisan kebiasaan, dalam hal para lelaki yang mendominasi aktivitas fisik keras berperang, bepergian jauh, dan lain-lain. Dengan demikian pandangan teoretis para ahli tersebut, yang memberi penekanan pada kenyataan sosial-budaya dan biologis yang bersifat alami, dapat menjadi dasar pertimbangan untuk arah pembangunan perempuan di Indonesia.

Terdapat faktor-faktor dasar pendukung dan pendorong (*stimulant*) pembangunan perempuan, seperti adanya: 60% perempuan berperan dalam posisi fungsional sebagai PNS dibandingkan laki-laki hanya 40%, kondisi umur harapan hidup perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, sentuhan pembangunan kesehatan umum yang cukup baik bagi perempuan (kecuali kesehatan maternal), dan contoh kaum perempuan berperan dalam bidang sosial dan ekonomi di pulau Jawa. Di samping itu terdapat pandangan teoretis (dari Ashley Montagu), tentang perempuan lebih berbakat dibandingkan dengan laki-laki, dan perempuan secara keseluruhan memiliki sejumlah keuntungan biologis dibandingkan dengan laki-laki, yang secara positif dapat menyemangati pembangunan perempuan di Indonesia.

Namun, cenderung terdapat faktor-faktor sosial-budaya yang secara relatif bisa menjadi penghambat (*barrier*) pembangunan perempuan di Indonesia, yang dikaji dari kehidupan transportasi umum, bisnis seni sinetron (keduanya sebagai kajian di JABODETABEK), dan kehidupan perempuan

pedesaan di Kabupaten Sumedang. Secara sosial budaya, data teoretis hasil riset lapangan menunjukkan terdapat budaya yang terenkulturasi, mengenai perempuan dalam bepergian dengan alat transportasi umum, dianggap wajar harus diberi kesempatan oleh para lelaki untuk memperoleh kenyamanan fisik. Budaya ini menyimbolkan perempuan secara fisik lebih lemah daripada lelaki. Pada pekerjaan produksi bidang seni sinetron, ini secara budaya didominasi oleh lelaki, karena pekerjaan ini tak diapresiasi kaum perempuan (berbeda dengan apresiasi kaum perempuan tertentu akhir-akhir ini terhadap peran politis dan birokratis). Khususnya kaum perempuan di pedesaan, secara umum cenderung berbudaya menerima apa adanya dan tidak mempersoalkan jika hanya berperan domestik saja dalam rumah tangga.

Saran

Untuk memajukan kaum perempuan di Indonesia, potensi perempuan dapat dipakai sebagai dasar pemberdayaan perempuan melalui beberapa kebijakan pemerintah. Dalam hal itu pemerintah perlu membudayakan (dalam pendidikan formal, termasuk secara informal di masyarakat), bahwa perempuan dapat berperan dalam bidang pekerjaan apa saja, di samping berperan secara domestik. Hal ini dapat didukung dengan data dalam paper ini bahwa banyak bidang sosial dan ekonomi tertentu justru secara positif didominasi kaum perempuan. Terkait dengan pembangunan perempuan berperan secara sosial sejajar dengan laki-laki, maka pemerintah harus konsekuen dengan penetapan anggaran pendidikan nasional, yang secara kuantitatif dapat menjangkau kesempatan perempuan mengembangkan status pendidikan dan merubah nasibnya. Pemerintah juga harus memaksimalkan anggaran pembangunan kesehatan nasional, yang secara khusus dapat memajukan kesehatan maternal yang cenderung belum baik di Indonesia, untuk mendukung peran gandanya.

Dalam mementingkan peran ganda perempuan terkait dengan peran politis-birokratis dan di berbagai bidang, kaum perempuan dan terutama pemerintah dapat menggunakan dasar pandangan, pentingnya peranan perempuan secara bio-psiko-sosio-budaya dalam rumah tangga. Peranan tersebut sangat penting untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dari segi kesehatan mental dan fisik (berpangkal pada konsep dasar tumbuh kembang anak). Demikian "peranan perempuan dalam rumah tangga (keluarga) dalam masa anak BALITA dan memasuki remaja, menjadi

faktor/variabel berpengaruh terhadap ada-tidaknya anak-anak remaja bertawuran di jalanan, adanya para suami yang sering memukuli, menyiksa, dan bisa beberapa kali menceraikan istri. Hal tersebut terkait dengan faktor kasih sayang dan enkulturasi normatif yang tidak diperoleh anak-anak pada ibu kandung mereka, kendati tokoh ibu kandung mereka tidak bisa diperoleh dari isteri mereka (LeVine, 1988; Danandjaja, 1988; Malonda, 2008). Tetapi kaum perempuan yang ingin berperan dalam bidang politis-birokratis dan bidang-bidang lainnya dalam konteks peran ganda, dapat menggunakan pandangan teoretis Schlegel (1972), yang menyatakan bahwa "harapan-harapan keberhasilan dan kepuasan perorangan (yang diyakini perempuan) pada suatu arena, mengancam dan merongrong terhadap faktor arena lain mereka". Artinya peran penting dalam rumah tangga (keluarga) untuk menghasilkan SDM ideal cenderung bisa terabaikan kalau peranan perempuan "lebih" terpusat pada peran di luar rumah. Hal tersebut penting sekali dikemukakan karena juga diduga keterlibatan anak-anak dengan NARKOBA, adanya penyakit sosial premanisme dan korupsi, dan lain-lain, diakibatkan karena kurangnya peran positif rumah tangga (keluarga) terutama "perempuan" dalam konteks bio-psiko-sosio-budaya untuk pembangunan tumbuh kembang anak.

Akhirnya, pemerintah dan dalam bidang terkait perlu melakukan riset secara kuantitatif di Indonesia dengan sampel besar, mengenai KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), untuk dijadikan pegangan dalam pembangunan perempuan, berdasarkan pandangan hasil riset Burbank (1994) bahwa "perempuan menjadi sasaran korban sebanyak laki-laki, sebagaimana laki-laki menjadi sasaran korban dari perempuan". Pemerintah juga perlu melakukan riset secara lintas budaya di Indonesia, tentang berbagai faktor yang berpengaruh terhadap faktor kaum perempuan tertentu, yang lebih cenderung berperan secara domestik saja, dalam konteks relativitas budaya dan kearifan lokal.

Daftar Pustaka

- Brown, D. (1991) *Human Universal*. Philadelphia PA: Temple University Press.
- Burbank, V.K. (1994) *Fighting Women: Anger and aggression in Aboriginal Australia*. Berkeley: University of California Press.
- Danandjaja, J. (1988) *Antropologi Psikologi: Teori, Metode, dan Sejarah Perkembangannya*. Jakarta: Radjawali.

- Friedl, E. (1975) *Women and Men: an Anthropologist View*. New York: Holt.
- Geertz, Hildred (1983) *Keluarga Jawa*. Jakarta: Percetakan PT Temprint.
- Gobel (2005) *Peran Perempuan dalam Posisi Bidang Pemerintahan*. Manado: Rubrik opini, Mdo Pos.
- Indonesia, Laporan Pembangunan Manusia (2004) *Ekonomi dari Demokrasi Membiayai Pembangunan Manusia Indonesia*. BPS, BAPPENAS & UNDP.
- Kongres Wanita Indonesia (1978). *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Lepowsky, M (1993) *Fruit of the Motherland: Gender in an Egalitarian Society*. New York: Columbia University Press.
- LeVine, R.A. (1988) *Culture Behaviour, and Personality*. Chicago: Aldine Publisher.
- Lewellen, T. (1992) *Political Anthropology: an Introduction* (2nd edn). Westport CT: Bergin & Garvey.
- Maccoby, E. & Jacklin, C. (1974) *The Psychology of Sex Difference*. Stanford University Press.
- Malonda, B.F. (1993) *Tinjauan Tentang Peranan Perempuan dalam Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Pulau Jawa*. Artikel disampaikan pada seminar sehari GMT (tidak dipublikasikan).
- Malonda, B.F. (2002) Faktor-faktor Sosial-Budaya Reproduksi dan Gangguan Emosi serta Fisik Ibu Hamil, Bersalin-Pascasalin pada masyarakat Pedesaan Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kedokteran dan Farmasi MEDIKA* 12. Tahun ke XXVIII Hal. 763–772.
- Malonda, B.F. (2008) Peranan Perempuan, Sosialisasi Anak, dan Perilaku Murid Sekolah Lanjutan dalam Sub-Budaya. *Media Perempuan*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI. Edisi I Tahun 2008, Hal 15–23.
- Manumpil, F. (2007) *Budaya Patriarki dan Penegakan Hak Asasi Perempuan*. Rubrik opini 10 Maret 2007, Mdo Pos.
- Metro TV (2005) *Peranan Perempuan*. Wawancara Malam terhadap Menteri PP. 16 Desember 2005.
- Montagu, A. (1953) *The Natural Superiority of Women*. New York: The Mac-millan Company.
- Muniarti, A.P. (1992) Perempuan Indonesia dan Pola Ketergantungan. Dalam *Citra Wanita dan Kekuasaan (Jawa)*. Seri Siasat Kebudayaan. Kanisius Lembaga Sturi Realino.
- Nurjaya, I Nyoman. 2001. *Magersari: Studi Kasus Hubungan Kerja Penduduk Setempat dalam Pengusahaan Hutan*. UI: Disertasi Program Pascasarjana Bid. Antropologi.
- Ortner & Whitehead (eds). (1981) *Sexual Meaning: the Cultural Construction of Gender and Sexuality*. Cambridge: University Press.
- Pudjiwati, S. (1985) *Peranan wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: CV Radjawali.
- Rosaldo, M & Lamphere, L. (eds). (1974) *Women, Culture, and Society*. Stanford University Press.

- Rosemary, W. & Gilbert, L. (1962) *Women and their Ascribed Roles*. Oxford: University Press.
- Saifuddin, A.F. (1990) "Some Notes on Clifford Geertz's Interpretive". Dalam *Antropologi Indonesia*, April, Hal. 1–29.
- Sanday, P. & Goodenough (eds). 1990. *Beyond the Second Sex: New Direction in the Anthropology of Gender*. Philadelphia: University of Philadelphia Press.
- Schlegel, A. (1972) *Male Dominance and Female Autonomy: Domestic Authority in Matrilineal Societies*. New Haven: HRAF.
- Susanto, Astrid (1975) Wanita Desa dalam Pembangunan, dalam *Prisma* no. 5 Oct. IV.
- Stoller, Ann (1975) Some Socio-economic Aspects of Rice Harvesting in a Javanese Village, dalam *Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia*. Tahun II. No. 1.
- Thamrin, J. (2005) *Gerakan Demokratisasi Lokal melalui Peran Forum Warga di Indramayu*. Paper disampaikan pada Seminar Internasional Jurnal antropologi. UI Jakarta (tidak di publikasikan).
- Tribun Sulut (2007). *Unjuk Rasa Aktivis Perempuan dalam Memperingati Hari Perempuan Internasional*. Berita Kota Manado 8 Maret 2007.
- TVRI, 2005. *Perjuangan Peranan Perempuan*. Komentar dalam Berita Malam, 26 Nopember.
- Yanagisako Sylvia, & Jane Collier (eds) 1987. *Gender and Kinship: Essay Toward a Unified Analysis*. Stanford CA: Stanford University Press.